

IMPLEMENTASI PENGURUSAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo)

IMPLEMENTATION OF PERMISSION MANAGEMENT OF PRIVATE WORK TRAINING INSTITUTIONS (Study at Manpower Office of Ponorogo Regency)

**Yusron Adhan
Verdiansyah¹**

Universitas
Muhammadiyah
Ponorogo
email:

yusronadhan08@gmail.com

**Robby Darwis
Nasution²**

Universitas
Muhammadiyah
Ponorogo
email:

darwisnasution69@gmail.com

**Yusuf Adam
Hilman³**

Universitas
Muhammadiyah
Ponorogo
email:

adamhilman@umpo.ac.id

Jusuf Harsono⁴

Universitas
Muhammadiyah
Ponorogo
email:

jsfharsono@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang implementasi pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ini sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga kerja Indonesia. Pemerintah menerbitkan kebijakan pelayanan berusaha berbasis elektronik berbentuk Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau yang disebut dengan Online Single Submission (OSS) pada Juli 2018. Sistem OSS ditujukan dalam rangka untuk mempersingkat waktu serta memangkas panjangnya birokrasi dalam proses permohonan perizinan. Namun dalam pelaksanaannya system OSS sering mengalami error sehingga menyebabkan menghambat proses perizinan. Penelitian tentang implementasi pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Temuan dari penelitian ini adalah proses implementasi berjalan dengan lancar akan tetapi terdapat kendala aplikasi OSS sering error dan fasilitas internet dan sarana prasarana kurang memadai. Dinas tenaga kerja ponorogo dalam meningkatkan kualitas pengurusan izin lembaga pelatihan kerja swasta dengan menambahkan personil tim/petugas verifikasi kepada pihak provinsi maupun pusat dengan memberikan pelatihan/bimtek/sosialisasi terhadap aplikasi OSS guna memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana agar memadai.

Kata Kunci: Implementasi, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Sistem OSS.

Abstract: This study discusses the implementation of obtaining a permit for the Private Job Training Institute at the Manpower Office of Ponorogo Regency. The low quality of the Indonesian workforce has resulted in the community not having a capable mastery of knowledge. The Indonesian government established this Private Job Training Institute as a solution to improve the quality of Human Resources for Indonesian workers. The government issued an electronic-based business service policy in the form of Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business licensing or the so-called Online Single Submission (OSS) in July 2018. The OSS system is intended to shorten the time and reduce the length of bureaucracy in the licensing application process. However, in its implementation, the OSS system often experiences errors, causing it to hamper the licensing process. This research on the implementation of the permit management of the Private Job Training Institute uses a qualitative descriptive method with the type of research that examines the condition of natural objects where the researcher is the key instrument. The findings of this study are that the

JGPI
p-ISSN: 2774-907X
e-ISSN: 2775-0140
Vol. 2, No. 2, pp. 109-
115
Oktober, 2022



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

implementation process runs smoothly, but there are obstacles in the OSS application that often errors and internet facilities and infrastructure are inadequate. The Ponorogo Manpower Office in improving the quality of obtaining permits for private job training institutions by adding team personnel/verification officers to the provincial and central parties by providing training/bimtek/socialization of the OSS application in order to improve and improve facilities and infrastructure to be adequate.

Keywords: *Implementation, Private Job Training Institute, OSS System.*

PENDAHULUAN

Berangkat dari permasalahan mengenai rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan yang mumpuni sehingga pengangguran di Indonesia semakin banyak. Kurangnya pembelajaran ilmu pengetahuan mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada buruknya proses menghasilkan barang dan jasa. Kualitas ketenagakerjaan yang buruk merupakan masalah yang perlu segera ditangani agar tidak kalah dengan tenaga kerja asing. (Ulfa, 2018).

Kehadiran jenjang pendidikan yang berkedudukan tinggi dinilai sangat dibutuhkan mengingat tuntutan tingkat pendidikan dan keahlian yang semakin meningkat di masyarakat khususnya di dunia kerja. Masyarakat memanfaatkan berbagai lembaga pendidikan dan keahlian dengan berbagai kemampuan sesuai dengan kepentingan diri sendiri. Untuk mencapai kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu adanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. (Putri, 2018).

Menurut pengertiannya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ialah lembaga pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi dan produktivitas kerja di tingkat ketrampilan dan pengetahuan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB V Pelatihan Kerja. Dinas Tenaga Kerja diberikan kewenangan sebatas pendamping membantu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta baik dari segi pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 17 Tahun 2016 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja untuk masyarakat setempat, memerlukan perizinan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Perizinan yang dimaksud pada ayat 1 ialah memperoleh nomor pendaftaran Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016).

Masyarakat selalu menginginkan bentuk pelayanan yang sebaik mungkin. Berdasarkan pendapat Sampara Lukma menjelaskan mengenai pelayanan ialah sebuah tindakan memberikan kepuasan pelanggan yang berarti melakukan interaksi langsung (Sinambela, 2014). Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk membuat inovasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Online Single Submission yang disingkat dengan OSS atau biasa disebut Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, peningkatan ekosistem ekonomi investasi dan kegiatan berusaha. (Faridah, 2021).

Sistem Online Single Submission yang disingkat dengan OSS atau biasa disebut Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan platform untuk Perzinan Berusaha yang dibuat oleh Lembaga OSS sendiri yang digunakan untuk dan atas sanam menteri, pimpinan lembaga, Bupati/Wali Kota, Gubernur, yang ditujukan untk para pelaku usaha dengan media elektronik yang terintegrasi.

Tujuan dari terbentuknya sistem OSS ini adalah guna mempermudah izin usaha dan mengurangi rumitnya proses penerbitan izin usaha di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di seluruh Indonesia khususnya izin usaha pusat dan daerah kota Ponorogo hanya melewati satu pintu yaitu sistem OSS.

Manfaat dari terbentuknya Sistem OSS adalah mempercepat pengurusan izin usaha, mulai dari izin lokasi, lingkungan, bangunan dan penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha di pusat dan daerah. Memberikan fasilitas pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam Nomor induk bangunan, memberikan fasilitas pelaku usaha supaya terhubung dengan pihak yang memiliki kepentingan suatu perusahaan atau organisasi dan memperoleh persetujuan dengan aman dan cepat. (Oktavia, 2019).

Dari pendahuluan tersebut dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dimana jenis penelitian ini terfokus pada proses pengamatan yang mendalam dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2016). Lokasi penelitian yang digunakan untuk penggalan sumber data berada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta “Bina Nusantara Sejahtera”, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta “Yuniva Berkah Andaresta”, dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta “Prima Dona Sukses”.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana teknik purposive sampling merupakan proses penggalan informasi dilakukan tidak secara acak, melainkan dengan sengaja memilih informan dalam penelitian. Pelapor diidentifikasi dengan memilih sumber yang mungkin memberikan data dan informasi terlengkap.

Dalam pengambilan data terdapat tiga proses yaitu observasi, melalui observasi peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat atau jelas tentang masalah yang diteliti dan memberikan gambaran yang lengkap tentang objek yang diteliti (Sugiyono, 2015). Kedua Wawancara, melalui wawancara yang berarti melakukan interaksi dengan bertukar informasi secara lisan antara narasumber dan pencari informasi mengenai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2015). Ketiga Dokumentasi, Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti dari suatu kegiatan yang dapat didokumentasikan (Sugiyono, 2015). Untuk mempermudah proses penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN DISKUSI

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan pengurusan izin lembaga pelatihan kerja swasta yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja Ponorogo sudah sesuai standart operasional baik dari petugas yang bertugas di lapangan maupun di kantor. Hal tersebut juga disampaikan oleh beberapa lembaga pelatihan kerja swasta yang menyatakan keberadaan Dinas Tenaga Kerja Ponorogo sangat membantu kebutuhan masyarakat atas penyedia pelayanan pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Menurut hasil penelitian dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja Ponorogo menyambut baik dan mendukung pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta melalui system OSS. Dinas Tenaga Kerja Ponorogo dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta akan mengadakan seminar pelatihan sistem OSS yang nantinya mengundang pengurus Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada di Ponorogo. Namun saat ini Dinas Tenaga Kerja Ponorogo masih menunggu anggaran karena Dinas Tenaga Kerja Ponorogo membutuhkan dana untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Untuk proses implementasi berjalan dengan lancar akan tetapi terdapat kendala aplikasi OSS sering error dan fasilitas internet dan sarana prasarana kurang memadai. Dinas tenaga kerja ponorogo dalam meningkatkan kualitas pengurusan izin lembaga pelatihan kerja swasta dengan menambahkan personil tim/petugas verifikasi kepada pihak provinsi maupun pusat dengan memberikan pelatihan/bimtek/sosialisasi terhadap aplikasi OSS guna memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana agar memadai.

Menurut hasil penelitian dapat diketahui bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, pegawai memberikan pelayanan dengan maksimal. Pegawai memberikan pelayanan dengan bimbingan dan pendampingan dalam pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Menurut Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, pelayanan konsultasi lewat telepon juga merespon dengan baik apabila dalam proses melakukan input data ke system OSS dilakukukan di rumah. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta memiliki pandangan positif dan mendukung pengurusan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang melalui System OSS. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta merasa system OSS menjadi sarana perizinan online yang cepat dan mudah. Terdapat kendala di system OSS yang dialami yaitu kurangnya memahami pada informasi baru di website OSS, aplikasi OSS sering error sehingga sulit untuk melakukan input permohonan, dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan OSS tidak sama sehingga dalam melakukan input terjadi kesulitan.

Sistem OSS dinilai masih belum efektif dan belum efisien. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya kendala yaitu sistem OSS error. Sistem OSS error menyebabkan menghambat proses perizinan. Diketahui bahwa Sistem OSS ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan yang cepat dan tepat tanpa harus datang ke kantor.

KESIMPULAN

Berangkat dari permasalahan mengenai rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Hal ini menjadikan permasalahan ketenagakerjaan Indonesia yang perlu segera diatasi supaya tenaga kerja Indonesia perlu segera ditangani agar tidak kalah dengan tenaga kerja asing. Pemerintah Indonesia mempunyai Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ini untuk menjadi solusi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga kerja Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dan memuaskan. Pemerintah pusat melakukan terobosan baru berupa inovasi yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Sistem OSS ditujukan dalam rangka untuk mempersingkat waktu serta memangkas panjangnya birokrasi dalam proses permohonan perizinan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya system OSS sering mengalami error saat daftar akun pada proses verifikasi kode sehingga menyebabkan menghambat proses perizinan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditemukan bahwa pelayanan Dinas Tenaga Kerja Ponorogo dalam pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta kegiatan kerja yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana kerja dan standart operasional. Dinas Tenaga Kerja menyambut baik dan mendukung pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta melalui system OSS. Dinas Tenaga Kerja Ponorogo dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta akan mengadakan seminar pelatihan sistem OSS yang nantinya mengundang pengurus Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada di Ponorogo. Namun saat ini Dinas Tenaga Kerja Ponorogo masih menunggu anggaran karena Dinas Tenaga Kerja Ponorogo membutuhkan dana untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian untuk proses implementasi berjalan dengan lancar akan tetapi terdapat kendala aplikasi OSS sering error dan fasilitas internet dan sarana prasarana kurang memadai. Dinas tenaga kerja ponorogo dalam meningkatkan kualitas pengurusan izin lembaga pelatihan kerja swasta dengan menambahkan personil tim/petugas verifikasi kepada pihak provinsi maupun pusat dengan memberikan pelatihan/bimtek/sosialisasi terhadap aplikasi OSS guna memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sarana yang lebih layak.

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta juga menyatakan bahwa mereka memiliki pandangan positif dan mendukung pengurusan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

yang diakses melalui System OSS. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta merasa system OSS menjadi sarana perizinan online yang cepat dan mudah. Namun masih terdapat kendala di system OSS yaitu kurangnya memahami pada informasi baru di website OSS, aplikasi OSS sering error sehingga sulit untuk melakukan input permohonan, dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan OSS tidak sama sehingga dalam melakukan input data terjadi kesulitan. Sistem OSS dinilai masih belum efektif dan belum efisien. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya kendala yaitu sistem OSS error.

REFERENSI

- Faridah, J. S. (2021). Doctoral dissrtaion UMSU. *Efektivitas Penerapa Sistem Online Single Submission (OSS) dalam rangk meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di kota Medan* .
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. (n.d.). *Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016*. Retrieved from www.kemnaker.go.id:https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/permen_17_2016.pdf.
- Oktavia. (2019). *Analisis Penerimaan Sistem Pelayanan Online Single Submission Menggunakan Teori Teknologi Acceptance Model DI Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang*.
- Putri, H. A. (2018). Prosiding Seniati. *Analisis Regresi Non Linier Model Logistik* , 62-67.
- Sinambela, L. (2014). Reformasi Peayanan Publik. *Bumi Aksara*.
- Sugiyono. (2014). *Analisis Data*. Retrieved from Metode Penelitian: <http://eprints.umm.ac.id/41437/4/BAB%20III.pdf>.
- Sugiyono. (2015). *Dokumentasi*. Retrieved from Bab III Metode Penelitian: <http://repository.unpas.ac.id/30575/5/BAB%20III.pdf>.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Retrieved from Bab III Metode Penelitian: <https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/1340/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf?sequence=10&isAllowed=y>.
- Sugiyono. (2015). *Observasi*. Retrieved from Bab III Metode Penelitian: <http://repository.unpas.ac.id/30575/5/BAB%20III.pdf>.
- Sugiyono. (2015). *Wawancara*. Retrieved from Bab III Metode Penelitian: <http://repository.unpas.ac.id/30575/5/BAB%20III.pdf>.
- Ulfa, H. A. (2018). Prosiding Seniati. *Analisis Regresi Non Linier Model Logistik* , 62-67.